

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Karakteristik Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai PDRB DIY atas harga berlaku 2010 pada tahun 2017 mencapai 119,17 triliun rupiah. Secara nominal, nilai itu PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 8,33 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 110,01 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB di pengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 87,69 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 92,30 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 DIY mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,26 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatkan produksi di seluruh kategori, tidak dipengaruhi inflasi.

1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang tinggi dibentuk dari nilai tambah yang dihasilkan setiap kategori yang menyebabkan tergantungnya suatu daerah terhadap kemampuan produktivitas dari kategori tersebut.

Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori.

Selama lima tahun terakhir (2012-2017) struktur perekonomian DIY didominasi oleh 5 (lima) kategori, diantaranya: Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB DIY.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB DIY pada tahun 2017 dihasikan oleh kategori Industri Pengolahan, yaitu mencapai 13,12 persen (angka ini menurun dari 13,62 persen ditahun 2013), disusul oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,32 persen (naik dari 9,75 persen di tahun 2013). Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,01 persen (turun dari 11,33 persen di tahun 2013). Berikut kategori Konstruksi sebesar 9,49 persen (angkanya sama dengan tahun 2013) dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,59 persen (naik dari 8,17 persen).

Tabel 4.1
Ditribusi Presentase Produk Domestik Bruto D. I Yogyakarta Atas Harga
Berlaku Menurut Kategori 2013-2017

Kategori/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	13,62	13,59	13,11	13,21	13,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,49	9,40	9,36	9,34	9,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	9,75	10,04	10,24	10,22	10,32
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,65	7,00	7,02	7,09	7,03
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence Compulsory Social Security</i>	7,89	8,07	8,26	8,23	8,57
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,03	8,19	8,48	8,25	8,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
R, S, T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Di antara kelima kategori tersebut, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Pedagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga kategori yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan kategori lainnya masing-masing kurang dari 9 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada kategori tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk kategori tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB DIY pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB DIY atas harga konstan 2010, mencapai 92,30 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 4,61

triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya mencapai 5,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, terutama di sepanjang jalan Malioboro, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya, dan pembayaran ganti untung lahan bandara. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 14,26 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tarif dasar listrik yang mulai berlaku pada pertengahan bulan Juni 2017. Dari 17 kategori ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Delapan kategori mengalami pertumbuhan positif sebesar lima sampai sepuluh persen. Sedangkan delapan kategori lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Table 4.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010
D.I Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013-2017

Kategori/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,26	2,10	2,60	1,46	1,94
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,92	2,11	0,3	0,42	3,39
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,87	3,82	2,13	5,07	5,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6,08	6,83	2,19	14,26	3,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,95	3,91	2,90	2,36	3,46
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,94	5,65	4,24	5,42	6,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,26	5,69	6,19	6,09	5,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,10	3,80	3,73	4,51	474
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,13	6,79	5,77	5,51	6,21
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,22	6,13	5,11	8,32	6,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	11,50	8,27	8,27	4,98	2,80
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,01	7,77	6,05	5,14	4,34
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,27	7,61	7,31	3,43	5,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence Compulsory Social Security</i>	4,94	5,90	5,56	5,57	4,51
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,58	7,91	7,28	3,07	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,00	7,65	7,15	4,52	5,84
R, S, T, U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,86	5,29	8,00	5,70	5,76
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,37	5,47	5,18	5,05	5,28

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tiga kategori mengalami pertumbuhan positif lebih dari 6 persen, antara lain: kategori Konstruksi, sebesar 6,94 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,21 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,14 persen.

Selain itu, 6 (enam) kategori tumbuh dalam kisaran 5 sampai 6 persen, dan pertumbuhan 5 (lima) persen hingga 6 (enam) persen, diantaranya: kategori Jsasa Perusahaan tercatat sebesar 5,86 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,84 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 5,76 persen, Industri Pengolahan sebesar 5,74 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,72 persen, dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,56 persen. Sedangkan enam kategori yang mengalami 8 (delapan) lainnya tumbuh kurang dari 5 persen.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Per Kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita DIY atas harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,33 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga

tahun 2017 mencapai 27,56 juta rupiah (lihat tabel 1.1). kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Table 4.3
Tabel Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB
Per Kapita D.I Yogyakarta, 2013-2017

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2013	2014	2015	2016	2017
ADHB/ <i>at current price</i>	84.925	92.842	101.448	110.098	119.173
ADHK/ <i>at 2010 Constant Price</i>	75.627	79.536	83.474	87.688	92.301
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
ADHB/ <i>at current price</i>	23.624	25.526	27.573	29.589	31.677
ADHK/ <i>at 2010 Constant Price</i>	21.038	21.868	22.688	23.566	34.535
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ <i>xcGrowth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price</i>	4,23	3,95	3,75	3,87	4,11
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ <i>Population (Thousand People)</i>	3595	3637	3679	3721	3721
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ <i>Population Growth (Percent)</i>	1,19	1,18	1,16	1,13	1,11

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Table 4.4
Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta
Per Kabupaten Tahun 2012-2017

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Juta Rupiah				
	Sleman	Kota Yogyakarta	Gunung Kidul	Kulon Progo	Bantul
2012	23.957.113	19.189.075	9.695.980	5.475.148	13.407.022
2013	25.367.414	20.239.560	10.177.433	5.741.660	14.138.719
2014	26.713.070	21.307.600	10.639.790	6.004.316	14.851.124
2015	28.098.010	22.393.015	11.152.360	6.281.900	15.588.520
2016	29.573.990	23.538.102	11.697.450	6.580.780	16.376.780
2017	31.155.680	24.771.538	12.282.490	6.973.630	17.211.819

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel PDRB diatas menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017. Kabupaten Sleman mempunyai angka PDRB yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setiap tahunnya PDRB Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata diangka lebih dari 5 persen.

Selanjutnya disusul oleh Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 5,76 persen dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan pertumbuhan 5,64 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sleman mengalami keterlambatan dari 5,64 persen menjadi 5,30 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta 5,11 persen, sedikit mengalami percepatan dibanding tahun 2015 dimana pertumbuhannya mencapai 5,09 persen. Kemudian tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami percepatan 5,24 persen dibandingkan tahun 2016.

Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun 2012 dan 2013 dengan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dan 4,97 persen. Namun, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul mengalami keterlambatan dari tahun sebelumnya yakni hanya 4,54 persen. Sebaliknya, di tahun ahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan secara terus menerus dengan angka 4,81, 4,89, dan 5,00 persen.

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen dan tahun 2013 sebesar 5,05 persen lebih tinggi

dibandingkan tahun 2012. Di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengalami keterlambatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 4,37 persen, dan mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,64 persen di tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,76 persen dan disusul dengan pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 5,97 persen.

Tahun 2012 Kabupaten Bantul mempunyai pertumbuhan ekonomi 5,33 persen dan meningkat menjadi 5,46 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2014 Kabupaten Bantul mengalami keterlambatan pertumbuhan dari 5,46 persen menjadi 5,04 persen. Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dengan angka 4,97, 5,06, dan 5,10 persen.

B. Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data RAPBD D.I Yogyakarta tahun 2017, realisasi penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 5,08 triliun. Penerimaan ini meningkat sebesar 30,42 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Apabila diproporsikan, penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,42 persen, dari Dana Perimbangan sebesar 46,80 persen, serta dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar 16,78 persen.

Peningkatan PAD tercatat sebesar 10,65 persen menjadi 1,85 triliun, peningkatan Dana Perimbangan sebesar 46,80 persen menjadi 2,38 triliun, dan

peningkatan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 61,53 persen menjadi 853,41 miliar. Beberapa komponen mengalami peningkatan yang cukup besar. Komponen tersebut adalah dana penyesuaian dan otonomi daerah yang naik sebesar 61,76 persen, diikuti pendapatan hibah dan dana alokasi khusus yang naik masing-masing sebesar 51,87 persen dan 50,34 persen. Sementara itu, Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 39,70 persen menjadi 1,31 triliun.

Tabel 4.5

Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2014-2017/ *Actual Revenues of Government of D.I. Yogyakarta Province, 2013-2016*

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2014	2015	2016	2017
A.	Pendapatan Daerah	3.139.871.880	3.400.014.812	3.899.192.985	5.085.245.127
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ <i>Original Local Government Revenue</i>	1.464.604.954	1.593.110.770	1.673.749.197	1.851.977.303
1.1	Pajak Daerah/ <i>Local Taxe</i>	1.291.664.421	1.397.772.210	1.440.571.519	1.583.875.064
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Repayments</i>	445.595.094	45.811.954	36.603.083	41.432.294
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	48.247.831	52.502.632	57.333.771	71.411.760

1.4	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	80.097.558	97.023.974	139.240.024	155.258.185
2.	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1.013.811.389	1.021.886.268	1.697.108.535	2.379.856.462
2.1	Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing</i>	70.324.849	60.016.641	113.024.693	98.447.377
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Non Tax/Natural Resources Sharing</i>	6.431.380	2.240.865	40.736	36.079
2.3	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	899.923.550	920.544.722	940.835.434	1.314.372.147
2.4	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	37.131.610	39.084.040	643.207.672	967.000.859
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>		2.478.416.343	2.614.997.038	3.370.857.732	4.231.833.765

*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Lanjutan Tabel/Continued Tabel

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2014	2015	2016	2017
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah/ <i>Other Legal Revenue</i>	661.455.537	785.017.774	528.335.253	853.411.362
3.1	Pendapatan Hibah/ <i>Grants</i>	8.822.952	11.740.118	9.537.782	14.485.237
3.2	Dana Darurat/ <i>Emergency Funds</i>	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>tax sharing from and other local governments</i>	0	0	0	0
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / <i>Autonomous Region and Balancing Funds</i>	652.632.585	773.277	518.205.063	838.270.747
3.5	Bantuan Keuangan dari atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>financial assistance from and other local government</i>	0	0	592.408	655.378
3.6	Lainnya/ <i>Other Funds</i>	0	0	0	0
B	PEMBIAYAAN DAERAH	389.527.178	511.093.118	370.879.688	194.371.993
	TOTAL	3.529.399.058	3.911.107.930	4.270.072.673	5.279.617.120

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.6
Tabel Realisasi Belanja Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta
Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2014-2017/*Actual Expenditure of
Government of D.I. Yogyakarta Province by Kind of Expenditure (thousand
rupiahs), 2014-2017*

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditure</i>		2014	2015	2016	2017
A	BELANJA TDAK LANGSUNG	1.560.157.356	1.810.940.127	1.998.595.550	2.566.833.809
1	Belanja Pegawai	512.498.971	540.817.462	570.939.445	1.258.150.198
2	Belanja Bunga	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	441.914.970	562.260.179	727.099.422	574.360.049
5	Belanja Bantuan Sosial	9.919.078	7.073.500	1.919.000	1.091.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada	472.309.827	583.092.613	611.852.157	647.149.358
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	121.560.575	117.696.373	86.724.508	78.428.154
8	Belanja Tidak Terduga	1.953.935	0	61.018	7.655.050
B	BELANJA LANGSUNG	1.420.910.964	1.685.485.375	1.849.367.416	2.353.792.968
1	Belanja Pegawai	111.425.292	128.727.296	136.990.455	170.544.759
2	Belanja Barang dan Jasa	867.039.199	92.915.589	875.503.249	1.136.518.067
3	Belanja Modal	442.446.473	627.602.186	836.873.712	1.046.730.142
C	PEMBIAYAAN DAERAH	548.330.738	414.682.428	422.109.707	358.990.342
	Jumlah/Total	3.529.399.058	3.911.107.930	4.270.072.673	5.279.617.119

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.7

Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (ribu rupiah), *Actual Expenditure of Government of D.I. Yogyakarta Province (thousand rupiahs), 2017*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2016		2017	
	Pendapatan <i>Revenues</i>	Belanja <i>Expenditure</i>	Pendapatan <i>Revenues</i>	Belanja <i>Expenditure</i>
Kabupaten/ <i>Regency</i>				
1. Kulon Progo	1.358.070.875	1.388.596.506	1.402.546.138	1.440.263.093
2. Bantul	2.000.334.166	2.016.543.979	2.078.242.752	2.161.336.145
3 Gunungkidul	1.654.344.837	1.651.553.579	1.819.288.229	1.837.111.037
4. Sleman	2.329.097.456	2.455.446.949	2.472.110.989	2.615.343.534
Kota/ <i>City</i>				
1. Yogyakarta	1.577.679.933	1.665.420.971	1.510.296.678	1.644.123.792
Jumlah/ <i>Total</i>	8.919.527.267	9.177.561.984	9.282.484.786	9.698.177.601

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY.

Rencana anggaran belanja pemerintahan D.I Yogyakarta tahun 2017 tercatat sebesar Rp 5,279 triliun. Pengeluaran untuk belanja tidak langsung merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 48,62 persen dari total pengeluaran terutama untuk belanja pegawai yang mengambil porsi sebesar 23,83 persen dari total pengeluaran.

Besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 60,95 triliun, naik 12,11 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 54,36 triliun. Kredit yang disalurkan sebesar Rp 38,81 triliun atau 63,68 persen dari total dana yang dihimpun. Total kredit ini mengalami kenaikan sebesar 12,01 persen dibandingkan dengan tahun 2016.

Menurut jenis penggunaan, untuk modal kerja dan konsumsi masing-masing sekitar 39,12 persen dan 38,94 persen, sedangkan sisanya 21,94 persen untuk

investasi. Di bidang perkoperasian, pada tahun 2017 jumlah lembaga ekonomi yang berbasis kerakyatan ini mencapai 2.344 baik berupa koperasi primer maupun sekunder. Jumlah anggota tercatat sebanyak 945.099 orang. Di bidang investasi, realisasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang masuk ke D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar Rp 4,82 triliun dari rencana investasi sebesar Rp 9,28 triliun atau 51,93 persen dari rencana yang ditetapkan.

Investasi dalam negeri yang masuk ditanam tahun 2017 di sektor tersier (hotel dan restoran; perdagangan dan reparasi; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran; transportasi, gudang, dan komunikasi; listrik, gas, air; serta jasa lainnya) sekitar 57,77 persen. Sementara itu, pada sektor sekunder (industri), investasi dalam negeri yang ditanamkan sekitar 41,64 persen dan pada sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya sekitar 0,59 persen.

Sementara itu, realisasi kumulatif investasi penanaman modal asing (PMA) selama periode yang sama mencapai 107,04 persen atau tercatat sebesar Rp 8,04 triliun dari rencana sebesar Rp 7,51 triliun. Minat investor asing terkonsentrasi pada sektor tersier yang mencapai 71,07 persen. Sedangkan investasi di sektor primer dan sekunder tercatat sebesar 8,40 persen dan 20,53 persen dari total realisasi PMA.

Tabel 4.8
Tabel Pengeluaran Pemerintah
di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

	Tahun	GK (Juta Rupiah)	GP (Juta Rupiah)
Sleman	2012	132.536	13.975
	2013	206.860	21.801
	2014	282.862	40.214
	2015	426.783	38.704
	2016	344.002	29.384
	2017	380.627	43.133
Kota_Yogyakarta	2012	88.336	1.510
	2013	162.878	6.045
	2014	193.078	3.061
	2015	256.395	4.534
	2016	259.589	1.546
	2017	294.314	1.907
Bantul	2012	140.107	6.895
	2013	183.270	15.778
	2014	310.415	11.729
	2015	334.880	17.453
	2016	284.061	3.267
	2017	332.619	3.829
Kulon_Progo	2012	147.831	24.665
	2013	123.314	14.057
	2014	146.754	8.720
	2015	226.056	7.496
	2016	241.984	4.426
	2017	269.489	27.731
Gumung_Kidul	2012	164.361	5.719
	2013	179.342	23.490
	2014	127.290	13.213
	2015	238.175	7.117
	2016	234.691	13.885
	2017	396.845	21.567

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2012-2017 mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada tahun 2012 pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar Rp.132.536 dan untuk tahun 2013.2014 dan 2015 pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp.206.860 juta, Rp. 282.862 juta dan Rp. 426.783 juta. Selanjutnya di tahun 2016 pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 344.002 juta dan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.380.627 juta di tahun 2017. Di Kabupaten Sleman pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan juga mengalami naik turun, dengan pengeluaran sebesar Rp.13.975 juta di tahun 2012, dua tahun selanjutnya pengeluaran untuk kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp.21.801 juta dan Rp.40.214 juta. Tahun 2015 dan 2016 pengeluaran untuk kesehatan di Kabupaten Sleman turun menjadi Rp.29.384 juta dan Rp.29.384 juta. Sedangkan di tahun 2017 pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu Rp.43.133 juta.

Berbeda dengan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta mempunyai pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, terutama di tahun 2012-2012 dengan pengeluaran antara Rp.88.336 juta sampai dengan Rp.294.314. pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Kabupaten Sleman mengalami naik turun dengan pengeluaran terkecil di tahun 2012 sebesar Rp.1.510 juta dan

pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan biaya pengeluaran sebesar Rp.6.045 juta.

Kabupaten Bantul juga mempunyai pengeluaran pemerintah untuk kesehatan yang tinggi dan mengalami peningkatan di tahun 2012-2015 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.140.107 juta tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.183.270 juta dan kemudian naik menjadi Rp.310.415 juta dan Rp.334.880 juta di tahun 2014 dan 2015. Tahun 2016 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang awalnya Rp.334.880 juta menjadi Rp.284.061 juta yang kemudian naik lagi menjadi Rp.332.619 juta di tahun 2017. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2012-2017 juga mengalami naik turun dengan pengeluaran terbesar di tahun 2012 sebesar Rp.17.453 juta dan pengeluaran terkecil di tahun 2016 dengan pengeluaran sebesar Rp.3.267 juta.

Tahun 2012-2017 pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan satu kali di tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar Rp.123.314 juta, untuk tahun lainnya mengalami peningkatan dengan pengeluaran terbesar di tahun 2017 sebesar Rp.269.489 juta. Sama halnya dengan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan Kabupaten lain, Kabupaten Kulon Progo juga mengalami naik turun. Pengeluaran terbesar terjadi di tahun 2012 dan tahun 2017 dengan pengeluaran sebesar Rp.24.6665 juta dan Rp.27.731 juta. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016

menjadi pengeluara terkecil selama tahun 2012-2017 yakni sebesar Rp.4.426 juta.

Kabupaten Gunung Kidul melakukan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang juga mengalami naik turun sama dengan Kabupaten lainnya. Di mulai dari tahun 2012-2017 Kabupaten Gunung Kidul mempunyai pengeluaran terkecil di tahun 2014 dengan pengeluaran sebesar Rp.127.290 juta dan terbesar di tahun 2017 dengan pengeluaran sebesar Rp.396.845 juta. Kemudian pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, Kabupaten Gunung Kidul mengeluarkan sebesar Rp.5.719 juta di tahun 2012 yang kemudian disusul dengan kenaikan pengeluaran yang sangat besar yakni Rp.23.490 juta dibandingkan tahun sebelumnya, untuk tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dan kembali naik di tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.13.885 juta dan Rp.21.567 juta.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terbesar dilakukan oleh Kabupaten Sleman dengan pengeluaran sebesar Rp.426.783 juta di tahun 2015 dan disusul oleh Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2017 dengan pengeluaran sebesar Rp.396.845 juta. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang paling kecil dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta yakni sebesar Rp.88.336 juta dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) paling banyak dikeluarkan oleh

Kabupaten Sleman di tahun 2017 dengan pengeluaran sebesar Rp.43.133 juta dan pengeluaran terkecil dilakukan oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp.1.510 juta.

Tabel diatas juga menunjukkan dari mana asal pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka harapan hidup adalah banyaknya tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk di suatu wilayah dengan menggunakan angka kematian dan kelahiran per tahun yang akan memperlihatkan tingkat hidup sehat dan rata-rata lama hidup. Dalam penelitian ini dana yang digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan diambil dari dana belanja modal yang digunakan untuk memperbaiki atau membangun gedung rumah sakit agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga akan meningkatkan angka harapan hidup. Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam satuan juta rupiah.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan guna memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diambil dari dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada mereka yang kurang mampu untuk memenuhi biaya pendidikannya. Data diambil dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam satuan juta rupiah.

C. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4.9
Tabel Indeks Pembangunan Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta Per Kabupaten Tahun 2012-2107

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia					
	DIY	Sleman	Kota Yogyakarta	Gunung Kidul	Kulon Progo	Bantul
2012	76,15	80,1	83,29	83,29	83,29	83,29
2013	76,44	80,26	83,61	83,61	83,61	83,61
2014	76,81	80,73	83,78	83,78	83,78	83,78
2015	77,59	81,2	84,56	84,56	84,56	84,56
2016	78,38	82,15	85,32	85,32	85,32	85,32
2017	78,89	82,85	85,49	85,49	85,49	85,49

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Dari tabel di atas dapat diuraikan, bahwa, penyusunan IPM untuk tahun 2017 tersebut ditetapkan berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan merata di seluruh daerah di Indonesia oleh BPS. Angka IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 78,89, angka ini diatas rata-rata nasional sebesar 70,81. Dari hasil survei tersebut beberapa indikator penyusun IPM Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa tingkat harapan hidup warga di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu mencapai 74,74 tahun dengan harapan lama sekolah 16,81 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,42 tahun dengan pengeluaran riil perkapita per tahun mencapai Rp 17,77 juta. Meskipun memiliki nilai IPM yang cukup tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta harus

menghadapi kenyataan bahwa angka ketimpangan pendapatan atau gini ratio yang tak kalah tinggi. Dimana tahun 2016 angka ketimpangan pendapatan atau gini ratio Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,42, jauh tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya 0,394. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkatan ekonomi warga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat beragam. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai warga yang sangat kaya dan warga yang sangat miskin. Perbedaan ini umumnya banyak terjadi di wilayah perKotaan, sebab diwilayah pedesaan strata ekonominya hampir merata, selain itu penilaian gini ratio hanya berfokus pada aspek pendapatan. Meski demikian, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup rendah hanya 7,7 persen atau dibawah rata-rata nasional sekitar 10 persen.